

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Saat ini efek dari perubahan iklim kian dapat dirasakan. Perubahan iklim disebabkan oleh eksploitasi sumber daya alam yang berlebih sehingga memicu eskalasi emisi gas rumah kaca (GRK). Di wilayah Indonesia perubahan iklim di prediksi menyebabkan kenaikan temperatur secara konsisten mencapai 0,5% setiap tahunnya (RPJMN, 2020). Peningkatan suhu udara secara konstan dapat berdampak pada peningkatan cuaca ekstrim, kekeringan, dan bencana lain. Perubahan iklim tidak hanya berdampak pada lingkungan, tetapi juga dapat mempengaruhi ekonomi dan sosial. Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) telah mengakui urgensi situasi ini dan menetapkan tujuan untuk mengambil langkah mendesak untuk menanggulangi perubahan iklim dan efek yang ditimbulkan sebagai bagian dari *Sustainable Development Goals* (SDGs) dengan nama lain yaitu Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB).

Dalam mendukung pembangunan yang berkelanjutan, melalui *Paris Agreement* pada 22 April 2016 Indonesia berpartisipasi dalam menghadapi perubahan iklim, tertuang dalam *Nationally Determined Contribution* (NDC) yang berisi komitmen untuk meminimalisir emisi Gas Rumah Kaca (GRK) dan pengintensifan ketahanan iklim. Di samping itu, pengintegrasian kebijakan penanganan perubahan iklim dan SDGs ke dalam program perencanaan pembangunan dinilai memiliki peran vital untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan yang mencakup seluruh sektor hal tersebut terhubung dengan 17 goals yang ditentukan dalam SDGs. Dengan demikian, tindakan yang berkelanjutan dan

terpadu diperlukan untuk mengatasi perubahan iklim dan mencapai pembangunan yang berkelanjutan di Indonesia. Maka dari itu saat ini pemerintah memegang peran vital dalam menyusun rencana berkelanjutan untuk merealisasikan visi besar Indonesia yaitu keluar dari *middle-income trap* dan mampu menjadi negara dengan *high-income status* pada tahun 2045, serta mencapai *Net Zero Emission* (NZE) pada tahun 2060. Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menyusun strategi pembangunan berkelanjutan dan tepat sasaran untuk menunjang optimalisasi revitalisasi.

Pembangunan berkelanjutan telah menjadi topik yang semakin mendapat perhatian di tingkat global. Menurut *Brundtland Report* yang diterbitkan oleh PBB (1987) menyebutkan bahwa pembangunan berkelanjutan merupakan upaya untuk memenuhi kebutuhan generasi saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang dalam memenuhi kebutuhannya sendiri. Guna mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan diperlukan upaya kolaboratif dari berbagai sektor termasuk sektor ekonomi. Pembangunan berkelanjutan adalah konsep yang sangat penting dalam perkembangan ekonomi dan sosial Indonesia. Konsep ini menekankan pentingnya mencapai pembangunan ekonomi yang seimbang dengan mempertahankan kelestarian lingkungan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Di dalam konteks Indonesia, upaya untuk mencapai pembangunan berkelanjutan telah menjadi salah satu prioritas pemerintah.

Menurut BAPPENAS dalam *Green Economy Index* (2022) *Green Economy* (GE) merupakan pendekatan yang sangat relevan untuk mengawal isu lingkungan sambil meningkatkan ekonomi di Indonesia pendekatan tersebut memiliki potensi untuk menciptakan lapangan kerja baru, mengurangi dampak lingkungan negatif,

dan mendorong inovasi berkelanjutan di berbagai sektor ekonomi. Konsep *Green Economy* pertama kali dicetuskan oleh kelompok ekonom lingkungan Inggris dengan tujuan untuk menentukan alat ukur perkembangan ekonomi dan evaluasi program kerja serta kebijakan yang berkaitan dengan pembangunan berkelanjutan. Menurut *United Nations Environment Programme* (UNEP) pada *Flagship Report - Green Economy Report* tahun 2011, minimnya jumlah emisi karbon yang disertai dengan efisiensi dalam pemanfaatan sumber daya dan inklusivitas sosial yang memberikan dampak terhadap tingkatan kesejahteraan manusia baik dalam kesetaraan sosial dan kelestarian lingkungan.

BAPPENAS, melalui *green-growth* program, mendukung Indonesia dalam mencapai pembangunan ekonomi berkelanjutan yang dapat menghasilkan keseimbangan antara aspek sosial, lingkungan dan ekonomi. Mengutip A. Kasztelan (2017), *green growth* berfokus pada gerakan pembangunan ekonomi yang secara komprehensif menggabungkan elemen lingkungan dan sosial, guna mampu memanfaatkan sumber daya alam secara tepat sasaran untuk mengurangi emisi karbon dan penciptaan peluang kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan *Green Economy* untuk merealisasikan program pembangunan berkelanjutan. Program *green growth* bertujuan untuk merancang instrumen dan kebijakan ekonomi inovatif untuk mengurangi risiko dan memungkinkan aliran modal ke sektor terkait. BAPPENAS melihat *Green Economy* sebagai peluang untuk menjadi lebih produktif dan berkelanjutan, bukan sebagai hambatan bagi masa depan.

Berdasarkan riset yang dilakukan oleh BAPPENAS tahun 2022, *Green Economy* dapat membuka peluang pekerjaan dan investasi baru, termasuk investasi sebesar \$10 juta dalam teknologi terbarukan yang dapat menciptakan 75 juta

pekerjaan baru. Selain itu *Green Economy* juga dapat menciptakan tambahan 1,8 juta pekerjaan di sektor-sektor hijau seperti energi, kendaraan elektrik, restorasi lahan, dan pengelolaan limbah pada tahun 2030. Implementasi ekonomi berbasis siklus juga dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan, seperti peningkatan PDB, penciptaan lapangan kerja hijau, pengurangan produksi limbah, dan pengurangan emisi gas rumah kaca. Penerapan ekonomi berbasis siklus di Indonesia akan memperkuat manajemen sumber daya dan energi yang berkelanjutan serta berpotensi meningkatkan pendapatan ekonomi. Guna menjamin optimalisasi implementasi konsep *Green Economy* BAPPENAS telah meluncurkan *Green Economy Index* (GEI) untuk mengevaluasi pencapaian dan efektivitas transformasi ekonomi Indonesia mencapai pembangunan berkelanjutan.

Implementasi *Green Economy* tentu tidak lepas dari elemen kunci dalam mencapai pembangunan ekonomi yang berkelanjutan di Indonesia yaitu peran penting Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Berdasarkan analisis data yang diperoleh dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, UMKM memiliki kontribusi yang signifikan sebesar 61% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia. Saat ini, UMKM sedang mengalami tren positif dan dicanangkan untuk memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap perekonomian Indonesia. UMKM dinilai memiliki potensi besar untuk menjadi pilar ekonomi yang kuat, berkontribusi terhadap peningkatan pendapatan, penciptaan lapangan kerja, serta distribusi ekonomi yang lebih merata. UMKM juga memiliki kapabilitas untuk menghasilkan inovasi yang berkualitas dan mampu menyerap tenaga kerja lokal, menjadikannya elemen vital dalam upaya mencapai pembangunan berkelanjutan.

Mengutip portal berita CNN Indonesia (2022), menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Teten Masduki, menyampaikan dalam *side event* G20 bahwa sudah ada banyak UMKM Indonesia yang mengimplementasikan *Green Economy* dan mendorong penerapan *Green Economy* secara menyeluruh di setiap tingkatan bisnis dalam sektor industri. Meskipun demikian, tidak dijelaskan secara spesifik baik besaran atau sejauh mana penerapan konsep *Green Economy* yang diimplementasikan oleh UMKM di Indonesia

Pemerintah memegang peran vital dalam upaya mendukung pengembangan UMKM selaku roda penggerak perekonomian yang berkelanjutan. Dalam konteks penelitian ini, daerah Provinsi Jawa Tengah, khususnya Kota Semarang, perlu menciptakan lingkungan yang kondusif dan terstruktur untuk mendorong pertumbuhan UMKM yang berorientasi pada *Green Economy*. Hal ini tidak hanya berdampak pada perkembangan ekonomi yang berkelanjutan, tetapi juga berkontribusi pada pengurangan efek negatif yang ditimbulkan terhadap lingkungan, sosial dan ekonomi. Dengan mempromosikan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan ramah lingkungan, pemerintah daerah memberikan kontribusi yang berarti terhadap tujuan-tujuan pembangunan berkelanjutan. Maka dari itu dalam mengoptimalkan implementasi konsep *Green Economy* untuk mewujudkan visi besar Indonesia sebagai negara dengan berpenghasilan tinggi pada 2045 dan mencapai *Nett Zero Emission* (NZE) pada 2060, membutuhkan kebijakan yang strategis dan inklusif sebagai aspek krusial dalam menjamin pembangunan ekonomi berkelanjutan serta juga menjaga keberlangsungan lingkungan hidup

Sebagai bentuk respon dan komitmen Indonesia dalam mengantisipasi perubahan iklim dan membangun ekonomi yang berkelanjutan, dalam Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, kebijakan terkait *Green Economy* telah dicantumkan. Kehadiran gagasan *Green Economy* dipicu oleh kekhawatiran mendalam mengenai perubahan iklim yang ekstrem. RPJMN tersebut menetapkan tiga fokus kebijakan dan strategi yang komprehensif antara lain peningkatan kualitas lingkungan hidup, peningkatan ketahanan bencana dan iklim dan pembangunan Rendah Karbon sebagai bagian integral dari solusi meminimalisir jumlah emisi gas rumah kaca dan mengurangi intensitas emisi. Dalam kerangka RPJMN, strategi-strategi berkelanjutan diterapkan dalam setiap sektor. Meskipun demikian, dapat dilihat bahwa hingga saat ini kebijakan terkait *Green Economy* hanya tertuang dalam RPJMN 2020-2024 saja. Dalam konteks penelitian ini, *Green Economy* belum secara jelas tercantum dalam RPJMD Jawa Tengah tahun 2018-2023 dan RPJMD Kota Semarang tahun 2021-2026 selain itu, belum ada peraturan-peraturan lain yang mendukung secara komprehensif terkait penerapan konsep *Green Economy* khususnya di aspek pengembangan UMKM untuk mendorong UMKM yang ramah lingkungan dan berdaya saing tinggi guna mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.

Meskipun kerangka peraturan telah ada, belum banyak penelitian yang secara komprehensif menganalisis sejauh mana peran dan strategi pemerintah dalam mendukung perkembangan UMKM ke arah *Green Economy* untuk menunjang pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Oleh karena itu, skripsi ini bertujuan untuk mengisi celah pengetahuan ini dengan menggali lebih dalam tentang Kebijakan Pemberdayaan UMKM dalam mendukung *Green Economy* di kota Semarang.

1.2.Rumusan Masalah

Berdasarkan adanya kesenjangan penelitian mengenai penerapan konsep *Green Economy* oleh UMKM di Kota Semarang, penelitian ini merumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan konsep *Green Economy* oleh UMKM di Kota Semarang?
2. Bagaimana peran pemerintah dalam mendorong dan memberdayakan UMKM berbasis *Green Economy* di Kota Semarang?

1.3.Tujuan Penelitian

Berdasarkan adanya kesenjangan penelitian terkait penerapan konsep *Green Economy* oleh UMKM di Kota Semarang, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji beberapa poin berikut:

1. Memahami sejauh mana penerapan konsep *Green Economy* oleh UMKM di Kota Semarang.
2. Mengetahui peran pemerintah baik dalam bentuk kebijakan atau program yang mendukung penerapan konsep *Green Economy* pada UMKM di Kota Semarang

Dengan tujuan tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam memahami dan mengembangkan serta menyediakan rekomendasi solusi untuk memaksimalkan penerapan *Green Economy* oleh UMKM di Kota Semarang.

1.4.Kegunaan Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan penting untuk mendalami pemahaman, mengidentifikasi masalah dan tantangan yang dihadapi oleh pemerintah Kota

Semarang dalam upaya memberdayakan UMKM guna mewujudkan *Green Economy*. Penelitian ini dapat menjadi landasan untuk merumuskan solusi inovatif yang berfokus pada optimalisasi penerapan *Green Economy* di kota Semarang untuk dapat mewujudkan peningkatan nilai produk dan jasa yang dihasilkan oleh UMKM, serta berkontribusi pada peningkatan pendapatan dan penyerapan tenaga kerja di wilayah Kota Semarang. Dengan demikian, penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai referensi untuk memberikan pandangan yang lebih komprehensif terkait bagaimana kebijakan pemberdayaan UMKM untuk mewujudkan *Green Economy* dapat berperan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan di kota Semarang.

1.5. Penelitian Terdahulu

Tabel 1. 1 Penelitian terdahulu.

Judul	Fokus Penelitian	Konsep & Metode	Ringkasan
Bank Indonesia. (2022), “Kajian Model Bisnis Pengembangan UMKM Hijau”	Mengembangkan model bisnis UMKM yang berintegrasi dengan prinsip-prinsip keberlanjutan lingkungan dan mengklasifikasikan UMKM menjadi: eco-adaptor, eco-entrepreneur, dan eco-innovator.	Penelitian ini menggunakan konsep triple bottom line (TBL) dan framework kebijakan ekonomi dan keuangan hijau menggunakan metode studi literatur dan analisis kualitatif.	Kajian ini menyoroti pentingnya penerapan model bisnis berbasis keberlanjutan untuk pengembangan UMKM hijau. Penelitian ini fokus pada bagaimana model bisnis hijau dapat mendukung efisiensi penggunaan sumber daya, inovasi lingkungan, serta pengurangan jejak karbon serta mengidentifikasi tantangan regulasi dan peluang pasar.
Pradani, R., Amalia, L dkk. (2023). “Penerapan Konsep Green	Mengeksplorasi dan menganalisis penerapan konsep green economy dalam UMKM	Menggunakan konsep <i>green economy</i> data lapangan diperoleh melalui	Penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan konsep green economy di UMKM tahu di Situbondo berhasil

Economy Dalam Meningkatkan Pendapatan UMKM Tahu di Dusun Tahu Kabupaten Situbondo”	tahu di Dusun Tahu, Kabupaten Situbondo dengan mengidentifikasi proses operasional, tantangan dan dampaknya.	observasi dan wawancara pada pelaku UMKM tahu di Situbondo.	meningkatkan efisiensi produksi dan pengelolaan limbah, yang pada akhirnya meningkatkan pendapatan para pelaku usaha. Selain itu, penggunaan energi yang lebih efisien dan inovasi dalam proses produksi turut berkontribusi pada peningkatan profitabilitas UMKM tersebut.
Iskandar, A. dan Febriyantoro, M. (2019). Peran Kinerja Inovasi Hijau Dalam Menghubungkan Permintaan Pasar, dan Kinerja Bisnis (Studi pada UMKM di Kota Batam)	Penelitian ini mengeksplorasi peran inovasi hijau dalam menghubungkan permintaan pasar yang semakin peduli terhadap isu lingkungan dengan kinerja bisnis UMKM di Kota Batam,	Menggunakan konsep <i>Triple Bottom Line, Business Model, dan Green Supply Chain Management</i> . Studi kuantitatif melalui survei pada UMKM di Batam untuk mengukur hubungan antara permintaan pasar, inovasi hijau, dan kinerja bisnis.	Inovasi hijau berperan dalam meningkatkan daya saing dan keberlanjutan UMKM di Batam. Inovasi hijau tidak hanya menjawab permintaan pasar yang semakin peduli terhadap produk ramah lingkungan, tetapi juga berkontribusi pada peningkatan kinerja bisnis dalam jangka panjang.
Waluyo, S. E. Y., Fitriyani, Z. A., & Huda, K. (2022). Konsep Green Economy Terhadap Penjualan Sektor UMKM Melalui Pertumbuhan Ekonomi Kota Mojokerto	Implementasi green economy dapat meningkatkan penjualan UMKM melalui pertumbuhan ekonomi di Kota Mojokerto.	Konsep green economy digunakan sebagai variabel independen dan menggunakan analisis kualitatif untuk melihat pengaruh konsep green economy terhadap penjualan.	<i>green economy</i> memiliki dampak signifikan terhadap penjualan di sektor UMKM Kota Mojokerto. Melalui pemanfaatan sumber daya yang lebih efisien dan mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan berdampak pada peningkatan penjualan. Pertumbuhan ekonomi lokal menjadi faktor pendorong utama yang memperkuat dampak dari konsep keberlanjutan ini.

Sriyono, S., Biduri, S., & Prasajo, B. (2019). Analisis dan Identifikasi Model Pembiayaan Non APBN pada UMKM yang Berbasis Green Economy	Memahami bagaimana model pembiayaan ini dapat mendukung pengembangan UMKM yang ramah lingkungan dan berkelanjutan.	Konsep utama yang menjadi landasan penelitian adalah ekonomi hijau dan pembiayaan non-APBN untuk mendukung pembangunan UMKM menggunakan pendekatan deskriptif	Penelitian ini mengidentifikasi model pembiayaan non-APBN yang dapat mendukung pengembangan UMKM berbasis green economy. Studi ini menjelaskan bagaimana UMKM dapat memanfaatkan berbagai skema pembiayaan alternatif, termasuk pembiayaan berbasis komunitas dan investasi hijau, untuk meningkatkan kapasitas produksi serta efisiensi operasional mereka, tanpa harus bergantung pada sumber dana pemerintah.
Pangarso, A., Sisilia, K., Setyorini, R. et al. (2022), "The long path to achieving Green Economy performance for micro small medium enterprise"	Mengembangkan kerangka kerja penelitian, menerapkan konsep dan mengidentifikasi tantangan yang dihadapi UMKM dalam mengadopsi prinsip-prinsip ekonomi hijau dan bagaimana digitalisasi dapat membantu mereka menjalankan usaha yang lebih ramah lingkungan.	Menggunakan teori Ekonomi Hijau menekankan keberlanjutan untuk mencapai tujuan pembangunan, mengkaji pengaruh digitalisasi dan insentif pemerintah terhadap inovasi dan kinerja UMKM melalui studi longitudinal dengan pendekatan <i>mix-methods</i>.	Studi ini menyoroti perjalanan panjang yang harus ditempuh UMKM dalam mencapai performa green economy yang optimal. Penelitian ini mengungkap tantangan yang dihadapi UMKM, termasuk regulasi yang ketat, keterbatasan teknologi, serta kebutuhan akan perubahan pola pikir dalam menerapkan praktik bisnis yang lebih ramah lingkungan. Hasil studi ini menunjukkan bahwa meskipun jalannya sulit, penerapan green economy dapat memberikan manfaat ekonomi jangka panjang bagi UMKM.

1.6.Kerangka Teoritis

1.6.1. Teori Pemberdayaan

Pemberdayaan adalah tahapan yang ditujukan guna mengembangkan kapabilitas individu atau kelompok sehingga individu atau kelompok tersebut dapat memenuhi kebutuhan untuk mampu bertahan dalam berbagai kondisi. Pendekatan ini menekankan pada peningkatan kapasitas individu, kelompok, atau komunitas untuk mempengaruhi kehidupannya sendiri dan lingkungan sekitarnya. Menurut Suharto dalam (Habib, 2021) pemberdayaan mendorong setiap individu untuk berpartisipasi dalam menentukan putusan dan tindakan yang dapat mempengaruhi hidup mereka. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pemberdayaan merujuk pada proses, cara, atau tindakan untuk memberdayakan, yaitu upaya memberikan kemampuan atau kekuatan kepada seseorang atau kelompok agar mereka dapat mandiri dan berdaya. Secara etimologis, istilah "empowerment" berasal dari kata "power," yang berarti kekuasaan atau kemampuan. Dalam pandangan Morris (2006), "power" bukan hanya tentang dominasi atau kontrol, melainkan lebih kepada kemampuan seseorang untuk mempengaruhi hasil atau keputusan. Dengan kata lain, "power" tidak selalu berhubungan dengan keinginan untuk mendominasi orang lain, tetapi lebih pada kemampuan untuk menciptakan perubahan. Dari konsep tersebut, sinergi antara "power" dan "empowerment" menjadi sangat penting dan relevan. Empowerment atau pemberdayaan diartikan sebagai proses di mana individu atau kelompok mendapatkan kekuatan, kemampuan, atau kuasa untuk bertindak secara mandiri dan memberikan dampak positif kepada diri sendiri maupun orang lain. Menurut Julian Rappaport (1981) Pemberdayaan memungkinkan seseorang, kelompok, atau komunitas untuk

memiliki kendali atas hidupnya dan lingkungan sekitar untuk mengambil keputusan yang bermanfaat, serta membantu orang lain dalam mencapai tujuan bersama, yang dilakukan melalui proses dinamis dari interaksi sosial. Dalam konteks penelitian ini. John Friedmann (1992), menekankan pada penyediaan akses kepada masyarakat terhadap sumberdaya ekonomi dan sosial untuk mendorong partisipasi menjadi peran vital pemerintah dalam proses pembangunan. Pemberdayaan dalam konteks Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) berfokus pada penguatan kapasitas, kemandirian, dan pemberdayaan pelaku usaha. Pemberdayaan ini bertujuan untuk meningkatkan daya saing UMKM dalam menghadapi tantangan ekonomi. Berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2004 Pasal 4 prinsip pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) adalah sebagai berikut:

1. Penumbuhan kemandirian, kebersamaan, dan kewirausahaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) untuk berkarya dengan prakarsa sendiri.
2. Perwujudan kebijakan politik yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan.
3. Pengembangan usaha berbasis potensi daerah dan berorientasi pasar sesuai dengan kompetensi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).
4. Peningkatan daya saing Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).
5. Penyelenggara perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian secara terpadu.

Menurut Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2008, pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan secara sinergis oleh pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat untuk menciptakan iklim yang kondusif bagi pertumbuhan UMKM.

1.6.2. Teori Green Economy

Istilah *Green Economy* pertama kali dicetuskan oleh Anil Markandya, David Pearce dan Edward Barbier dalam buku berjudul *Blueprint for a Green Economy* pada tahun 1989. *Green Economy* ditujukan untuk membentuk sebuah konsep ekonomi yang ramah lingkungan dengan meminimalisir risiko kerusakan lingkungan dan kelangkaan ekologi untuk mendukung pembangunan berkelanjutan yang mencakup peningkatan kualitas hidup serta pendayagunaan sumber daya yang efisien dan bertanggung jawab sehingga mewujudkan peningkatan ekonomi dan kesejahteraan sosial. Definisi *Green Economy* tidak hanya berfokus pada reduksi emisi, tetapi juga pada eskalasi kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim, pengembangan sistem yang tidak menghasilkan sampah dan penggunaan bahan baku serta peningkatan kesejahteraan sosial. Boris Porfiriev (2013) menjelaskan bahwa *Green Economy* didefinisikan sebagai sebuah gagasan untuk mewujudkan kualitas hidup yang baik dengan memperhatikan kondisi lingkungan melalui penurunan jumlah emisi karbon dan gas rumah kaca melalui langkah cermat dalam memperhatikan dan beradaptasi terkait perubahan iklim, menciptakan konservasi sumber daya dan energi terbarukan. Dengan kata lain *Green Economy* meliputi berbagai strategi dan tindakan untuk menjamin efektivitas dan efisiensi operasional untuk mewujudkan peningkatan kualitas hidup dan pembangunan yang berkelanjutan. “Dalam ekonomi hijau, pertumbuhan lapangan kerja dan pendapatan didorong oleh investasi publik dan swasta ke dalam kegiatan ekonomi, infrastruktur,

dan aset yang memungkinkan pengurangan emisi karbon dan polusi, peningkatan efisiensi energi dan sumber daya, serta pencegahan hilangnya keanekaragaman hayati dan layanan ekosistem (UNEP, 2008).

Menurut Barbier (2010), transisi menuju Green Economy memerlukan reformasi kebijakan yang mendorong inovasi teknologi ramah lingkungan dan pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan. Reformasi ini mencakup berbagai aspek, seperti pemberian insentif fiskal untuk perusahaan yang mengadopsi teknologi bersih dan energi terbarukan, serta penetapan regulasi yang ketat untuk mengendalikan polusi dan emisi karbon. Langkah ini sejalan dengan pandangan UNEP (2011), yang menekankan bahwa Green Economy bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan manusia dan kesetaraan sosial, sambil secara signifikan mengurangi risiko lingkungan dan kelangkaan sumber daya alam. Porter dan van der Linde (1995) juga berpendapat bahwa regulasi lingkungan yang ketat dapat merangsang inovasi yang meningkatkan daya saing perusahaan. Mereka mengusulkan konsep "Porter Hypothesis," yang menyatakan bahwa kebijakan lingkungan yang baik dapat mendorong efisiensi operasional dan menciptakan nilai tambah bagi perusahaan dalam jangka panjang.

Dengan demikian, untuk mencapai transisi yang efektif menuju Green Economy, diperlukan pendekatan holistik yang mencakup dukungan kebijakan, insentif ekonomi, serta kolaborasi antara sektor publik dan swasta. Hal ini akan memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi yang dicapai tidak hanya berkelanjutan, tetapi juga inklusif dan berkeadilan sosial.

Meskipun demikian, sebagaimana dijelaskan sebelumnya, *Green Economy* merupakan gagasan tentang kondisi ideal untuk beradaptasi dengan modernisasi.

Maka dari itu untuk mewujudkan *Green Economy* secara global, setiap negara perlu untuk melakukan riset yang menghasilkan inovasi ekologis untuk menopang strategi tepat sasaran yang sesuai dengan karakteristik negara dan berkelanjutan.

1.6.3. **Business Model**

Konsep Model bisnis sudah banyak diteliti, salah satu definisi model bisnis berdasarkan analisis dari berbagai literatur sebelumnya menurut Zott, dkk (2010), dijelaskan sebagai sebuah unit analisis yang berpusat pada inti organisasi yang menekankan pada pendekatan holistik dan sistemik dalam menjelaskan operasional organisasi, model bisnis ditujukan guna menjelaskan *value-creation* dan *value-capture*, dalam kata lain model bisnis digunakan sebagai alat navigasi bagi perusahaan untuk menciptakan rencana strategis yang mendukung operasional secara efisien dan efektif sehingga mampu menjaga kompetivitas perusahaan dalam pasar. Meski demikian hingga saat ini, konseptualisasi teori terkait model bisnis masih dinilai kurang solid. Fjeldstad dan Snow dalam (Milei dkk, 2025). Menurut Sommer (2012) model bisnis dapat diimplementasikan untuk mencapai dan memanfaatkan peluang berkelanjutan dengan menghindari adanya kegagalan dalam transformasi model bisnis sehingga dapat mendorong perusahaan untuk menjadi lebih kompetitif. Trend berkelanjutan yang ada memantik perubahan dalam dunia bisnis (Esty dan Winston 2009) mendorong perusahaan untuk melakukan transformasi fundamental dan menghasilkan berbagai peluang baru dalam berkompetisi dari lingkungan bisnis yang dinamis.

Dari berbagai adaptasi teori yang ada model bisnis hijau merupakan salah satu dari banyak adaptasi yang muncul dari konsep model bisnis tradisional. Menurut Hart dan Milstein (1999) dalam (Sommer, 2012) terdapat perbedaan antara

menghijaukan model bisnis konvensional dengan mentransformasikan model bisnis menjadi lebih hijau. Menurut OECD dalam *Green Growth Paper* menyebutkan model bisnis hijau yang didukung dengan kebijakan yang sesuai tidak hanya dapat mendorong pada penciptaan permintaan pasar dan peningkatan finansial, tetapi juga dapat meningkatkan efisiensi sumber daya serta meminimalisir dampak pada lingkungan. *Green Business Model* dapat diimplementasikan ke berbagai skala bisnis tidak terkecuali UMKM. OECD mengklasifikasikan UMKM hijau kedalam tiga model bisnis yang dikembangkan oleh Bank Indonesia hasil dari modifikasi UMKM Hijau Koirala (2019), yaitu:

- a. *Eco-Adapters*, Kelompok ini - yang kemungkinan besar mewakili sebagian besar UKM - menyerupai 'pelaku hijau' yang disebutkan sebelumnya. Bagi mereka, keberlanjutan berarti adopsi teknologi ramah lingkungan dan praktik bisnis berkelanjutan. Berbeda dengan inovator ekologi dan wirausahawan ekologi, keberlanjutan kemungkinan tidak menjadi bagian inti dari model bisnis mereka (OECD, 2013).
- b. *Eco-Entrepreneurs*, memiliki kesamaan dengan pengusaha tradisional dalam hal mencari peluang baru yang disebabkan oleh perubahan nilai atau preferensi, peraturan, atau masalah – dan kemudian mengembangkan serta mengomersialkan solusi untuk peluang yang telah diidentifikasi. Namun, mereka berbeda dalam tujuan strategis dan motivasi mereka, serta cenderung melihat keberlanjutan yang lebih besar sebagai salah satu tujuan kewirausahaan mereka (OECD, 2013).

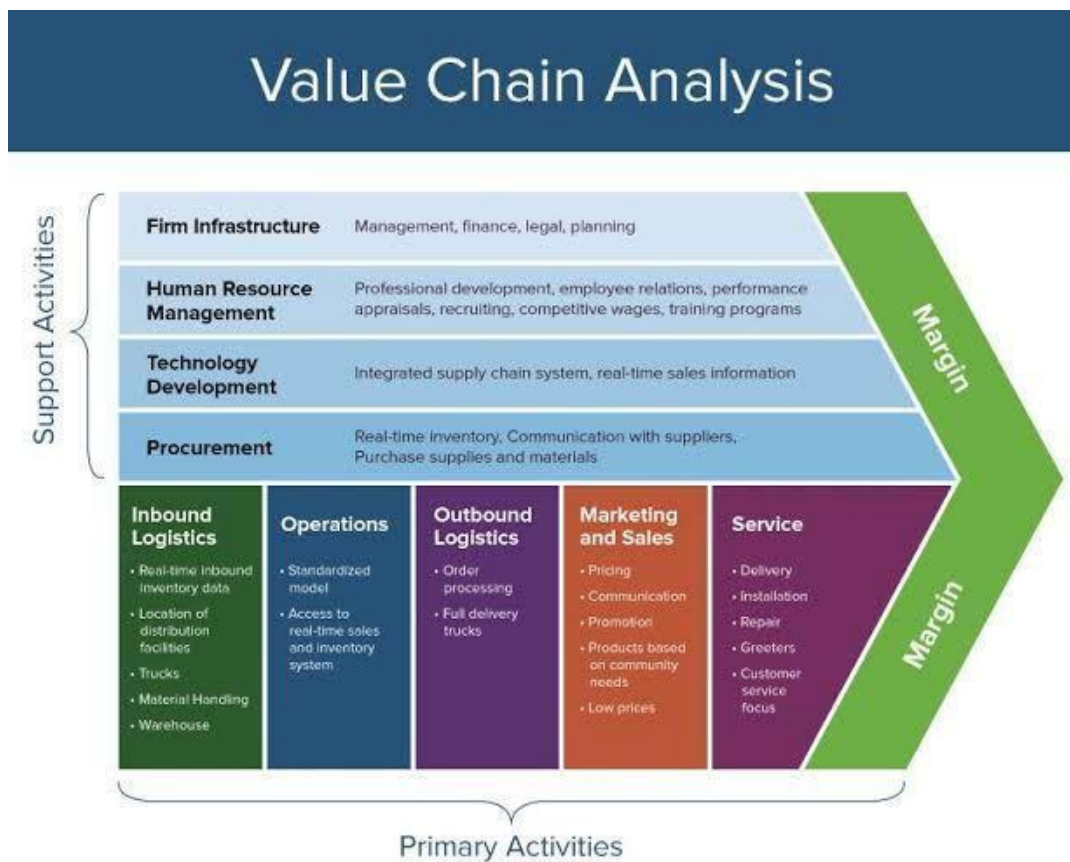
- c. *Eco-Innovators*, didefinisikan sebagai inovasi ekologi yang melibatkan pengenalan produk, proses, metode pemasaran, atau praktik organisasi baru dengan keunggulan dapat mengurangi dampak lingkungan. Inovasi ini juga mencakup perubahan dalam struktur sosial dan institusi, yang memberikan manfaat lingkungan tidak hanya bagi perusahaan, tetapi juga bagi masyarakat dengan mempengaruhi norma dan nilai sosial (OECD, 2009).

1.6.4. **Green Value Chain**

Value Chain menggambarkan seluruh rangkaian aktivitas yang diperlukan untuk membawa suatu produk dari tahap konsepsi, melalui fase produksi, pengiriman kepada konsumen akhir, hingga pembuangan akhir setelah digunakan (Kaplinsky dan Morris, 2000), sedangkan menurut Porter (1985) dalam (Amit dan Zott, 2001) *Value chain* digunakan untuk mengidentifikasi kegiatan organisasi dan mempelajari implikasinya terhadap ekonomi. Menurut Lee dan Yang (2000) perbedaan *value chain* yang dimiliki setiap organisasi merupakan sumber utama keunggulan kompetitif. *Value chain* terbagi menjadi 2 komponen di dalamnya yaitu, kegiatan primer yang mencakup segala aktivitas yang dilakukan untuk menghasilkan produk melibatkan operasional, *marketing*, penjualan dan lain lain, serta kegiatan pendukung yang mencakup segala aktivitas pendukung yang dapat mempengaruhi kegiatan primer, seperti manajemen sumber daya, infrastruktur perusahaan, pengadaan teknologi, dan lain lain. *Value Chain Analysis* ditujukan untuk mengembangkan strategi yang efisien dan *sustainable* untuk mampu bertahan dalam persaingan pasar. Mengaitkan dengan model *value chain* porter sebelumnya yang membahas terkait efisiensi operasional, dalam (Ahmed dan Sharma, 2006) Porter

dan Van der Linde (1995) serta Cordano (1993) menyebutkan bahwa strategi lingkungan dapat memberi dampak ekonomi positif. Cordano menambahkan bahwa pendapatan bisa meningkat melalui pemasaran hijau dan penjualan produk sampingan limbah, serta memanfaatkan keahlian lingkungan perusahaan untuk alih daya.

Gambar 1. 1 Value Chain Analysis



Sumber: www.smartsheet.com

Hasan dkk. (2019) mengkalsifikasikan *Green Value chain* menjadi beberapa komponen mencakup *green supply chain management*, *green management*, *green marketing*, *green information systems*, *green accounting*, *green technology*, and *3R*. berdasarkan riset yang sebelumnya telah dilaksanakan oleh Chun et al. (2015), Green et al. (2012), Mueller (2017), Staniškis (2011), Nogareda and Ziegler (2006)

Green supply chain merupakan salah satu komponen dalam *value chain*, *Supply chain* lebih terfokus pada logistik dan operasional sehingga fokus utamanya merujuk pada aktivitas untuk menghasilkan produk yang bernilai untuk dapat memberikan kepuasan pada pelanggan. *Green supply chain* mengintegrasikan prinsip keberlanjutan melalui tanggung jawab sosial dan komitmen lingkungan ke dalam seluruh aktivitas operasional perusahaan, mulai dari pengadaan bahan baku, proses produksi, distribusi, hingga pengelolaan limbah (Zhu & Sarkis, 2004; Bashar et al., 2025). Menghijaukan proses produksi dapat meningkatkan kemampuan bisnis untuk berkompetisi dalam perekonomian. Hal ini merujuk pada efisiensi operasional bisnis dapat meminimalisir memperoleh penghematan biaya yang signifikan, tetapi juga berpotensi meningkatkan penjualan, pangsa pasar, serta memanfaatkan peluang pasar baru yang pada akhirnya berdampak positif terhadap peningkatan margin keuntungan dan kinerja ekonomi perusahaan secara keseluruhan. (Rao & Holt, 2005) maka dari itu *green supply chain dianggap* sebagai bagian integral dalam *value chain* yang berfokus pada operasional dan logistik yang ramah lingkungan.

1.7.Operasional Konsep

Tabel 1. 2 Operasional Konsep.

Teori	Konsep/Kriteria	Indikator
<i>Sustainable Economy Theory</i>	<i>Green Economy</i>	Pedoman transformasi menjadi ekonomi yang ramah lingkungan, meminimalkan kerusakan ekologi, dan mendukung pembangunan berkelanjutan, diwujudkan melalui beberapa aspek: 1. Pengurangan emisi karbon dan gas rumah kaca. 2. Peningkatan kapasitas adaptasi terhadap

		perubahan iklim. 3. Penerapan sistem tanpa sampah dan penggunaan bahan baku berkelanjutan. 4. Investasi publik dan swasta dalam infrastruktur ramah lingkungan. 5. Peningkatan efisiensi energi dan sumber daya. 6. Perlindungan keanekaragaman hayati dan layanan ekosistem. 7. Inovasi ekologis untuk menopang strategi pembangunan berkelanjutan. Dalam mendukung transisi menuju Green Economy, peran pemerintah sangat penting dalam pemberdayaan dan pembangunan UMKM Hijau. Pemerintah berperan sebagai fasilitator, regulator, dan katalisator dalam menciptakan ekosistem yang mendukung praktik bisnis berkelanjutan, sebagaimana mengatur penghijauan UMKM diperlukan kolaborasi antar pemerintah dan badan non pemerintah untuk dapat menghasilkan kerangka kerja yang sesuai, meliputi: 1. Kerangka kerja institusi dan regulasi. 2. Akses keuangan. 3. Pembentukan demand pasar. 4. Akses untuk memperoleh keterampilan dan pengetahuan. 5. Infrastruktur. 6. Tata kelola kebijakan UMKM.
	<i>Business Model</i>	Alat untuk memahami operasional organisasi secara holistik, dengan fokus pada penciptaan

		dan penangkapan nilai yang membantu perusahaan menciptakan rencana strategis yang efisien dan efektif untuk menjaga daya saing di pasar OECD dalam <i>Green Growth Paper</i> menyebutkan bahwa model bisnis hijau, didukung oleh kebijakan yang tepat, tidak hanya dapat menciptakan permintaan pasar dan meningkatkan finansial, tetapi juga meningkatkan efisiensi sumber daya serta meminimalkan dampak lingkungan. Model bisnis hijau ini dapat diterapkan pada berbagai skala bisnis, termasuk UMKM, yang diklasifikasikan oleh OECD dalam tiga model bisnis hijau hasil modifikasi UMKM hijau oleh Koirala (2019): 1. <i>Eco-Adapters.</i> 2. <i>Eco-Entrepreneur.</i> 3. <i>Eco-Innovators.</i>
	<i>Value Chain Analysis</i>	Mencakup seluruh rangkaian aktivitas dari konsepsi hingga pembuangan produk, dan digunakan untuk memahami implikasi kegiatan organisasi terhadap ekonomi. Value chain terdiri dari kegiatan primer, yaitu: 1. <i>Inbound Logistic</i> 2. Operasional 3. <i>Outbound Logistic</i> 4. <i>Marketing</i> dan penjualan 5. Pelayanan.

		Adapun kegiatan pendukung, yaitu: 1. <i>Procurement</i> 2. <i>Technology development</i> 3. <i>Human resource management</i> 4. <i>Firm infrastructure</i>
Teori Peran Pemerintah	Teori Pemberdayaan (<i>Empowerment Theory</i>)	Teori pemberdayaan merupakan konsep yang kompleks dan multifaset, dengan fokus pada meningkatkan kemampuan, kesadaran, dan kemandirian masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2008 Pasal 4 prinsip pemberdayaan UMKM: 1. Penumbuhan kemandirian, kebersamaan, dan kewirausahaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) untuk berkarya dengan prakarsa sendiri. 2. Perwujudan kebijakan politik yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan. 3. Pengembangan usaha berbasis potensi daerah dan berorientasi pasar sesuai dengan kompetensi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). 4. Peningkatan daya saing Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). 5. Penyelenggara perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian secara terpadu.

1.8. Metode Penelitian

1.8.1. Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode studi kasus yang bertujuan untuk memahami fenomena sosial secara mendalam. Metode ini dipilih karena fokus pada eksplorasi dan pemahaman dari sudut pandang subjek penelitian, serta mampu menggali informasi yang tidak dapat diukur dengan angka. Menurut (Kusmarini, 2012) metode studi kasus memiliki kelebihan bagi peneliti untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam dan mengidentifikasi terkait suatu situasi atau fenomena yang memiliki banyak informasi. Melalui penggunaan metode ini memungkinkan peneliti untuk berinteraksi langsung dengan narasumber, sehingga dapat memperoleh data yang lebih kaya dan kontekstual yang berdasarkan makna dari pengalaman dan pandangan individu, serta memahami konteks sosial yang melatarbelakangi fenomena tersebut. Penelitian menggunakan metode studi kasus menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari narasumber yang dapat diamati

1.8.2. Situs Penelitian

Untuk memperoleh data primer penelitian akan dilakukan di Kota Semarang, situs penelitian dalam konteks ini merujuk kepada lokasi yang digunakan oleh peneliti untuk mengamati, menggali, dan mendokumentasikan keadaan nyata dari objek penelitian. Situs penelitian ini berfungsi sebagai sumber data yang penting dalam upaya memperoleh informasi yang relevan dan diperlukan untuk mengatasi permasalahan yang telah diuraikan dalam bab sebelumnya.

1.8.3. Subjek Penelitian

Subjek penelitian merujuk pada orang, kelompok, atau entitas yang menjadi fokus dari pengumpulan data dalam penelitian. Penelitian ini memiliki fokus pada UMKM yang telah mengenal, berpedoman dan mengimplementasikan konsep *Green Economy* dalam menjalankan operasional usahanya.

Tabel 1. 3 Narasumber dan Informasi yang diharapkan.

Narasumber	Informasi yang diharapkan
UMKM Hijau	1. Mengkaji implementasi konsep <i>Green Economy</i> menggunakan indikator UMKM Hijau oleh Bank Indonesia yang telah di modifikasi. 2. Mengetahui seberapa jauh keterlibatan pemerintah dalam pemberdayaan UMKM
Dinas Koperasi dan UMKM	1. kebijakan/rencana kebijakan dan program pemberdayaan UMKM berbasis <i>Green Economy</i> 2. Permasalahan dan kendala yang dihadapi dalam mendukung pemberdayaan UMKM berbasis <i>Green Economy</i> 3. Strategi mitigasi dalam menghadapi masalah terkait pengembangan UMKM berbasis <i>Green Economy</i>
BAPPEDA Kota Semarang	1. Rencana atau pembuatan kebijakan pendukung UMKM berbasis <i>Green Economy</i>. 2. Kendala yang dialami dalam penyusunan dan/atau pelaksanaan rencana pembangunan UMKM berbasis <i>Green Economy</i>.
DPRD Kota Semarang	1. Kebijakan/rencana kebijakan dan program pemberdayaan UMKM berbasis <i>Green Economy</i> 2. Alokasi anggaran pada program pemberdayaan

	UMKM berbasis <i>Green Economy</i> 3. Sinergi atau kerjasama antara DPRD, Pemerintah Kota Semarang, dan lembaga lain dalam mendorong implementasi ekonomi hijau di sektor UMKM 4. Hasil evaluasi DPRD terkait efektivitas pelaksanaan kebijakan green economy di sektor UMKM.
Sekretaris Daerah Kota Semarang	1. Kesiapan Kota Semarang untuk mengimplementasikan <i>Green Economy</i>. 2. Strategi dan Target yang diharapkan dalam pelaksanaan <i>Green Economy</i> di Kota Semarang. 3. Tantangan pelaksanaan <i>Green Economy</i> di Kota Semarang.

1.8.4. Jenis Data dan Sifat Penelitian

Penggunaan jenis data yang diperlukan dalam penelitian merupakan jenis data primer yang diperoleh melalui kegiatan interview narasumber UMKM terpilih yang memenuhi standar kualifikasi subjek penelitian yang telah ditentukan dan instansi terkait. Data primer berfungsi untuk mengkaji lebih dalam pengalaman, pandangan, dan persepsi dari setiap informan. Selain data primer, penelitian ini juga didukung dengan data sekunder yang diperoleh melalui penelitian atau sumber terdahulu dan digunakan untuk memberikan konteks dan dukungan terhadap analisis data primer.

1.8.5. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara mendalam dengan dua kelompok utama, yaitu pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

(UMKM) serta instansi pemerintah terkait. Wawancara dengan UMKM yang menerapkan praktik bisnis hijau bertujuan untuk mengetahui tingkat operasional bisnis mereka dalam aspek keberlanjutan, seperti efisiensi penggunaan sumber daya, pengelolaan limbah, serta tantangan yang dihadapi dalam menjalankan praktik ramah lingkungan. Sementara itu, wawancara dengan instansi pemerintah, seperti Dinas Koperasi dan UMKM atau Dinas Lingkungan Hidup, berfokus pada kebijakan, program, serta dukungan yang diberikan pemerintah dalam mendorong penerapan bisnis hijau di kalangan UMKM. Data yang dikumpulkan dari kedua kelompok ini bertujuan untuk memberikan gambaran komprehensif mengenai kondisi riil bisnis hijau pada UMKM serta peran pemerintah dalam mendukung upaya tersebut.

1.8.6. Teknik Pengumpulan Data

Penghimpunan data yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan teknik interview dan dokumentasi kepada informan UMKM terpilih yang memenuhi standar kualifikasi subjek penelitian yang telah ditentukan dan instansi pemerintah terkait.

1.8.7. Analisis Data

Analisis data merupakan suatu pencarian pola-pola dalam data-perilaku yang muncul dan objek-objek terkait dengan fokus penelitian. Proses interpretasi data merupakan proses yang melibatkan peninjauan data hingga menghasilkan kesimpulan yang relevan dengan mengimplementasikan berbagai metode analisis. Kegiatan analisis data dilakukan untuk membantu peneliti dalam mengolah data untuk menjawab pertanyaan kritis.

UMKM terpilih akan dianalisis menggunakan *value chain*, berpedoman pada model bisnis hijau koirala OECD (2019) yang sudah dimodifikasi oleh Bank Indonesia (2023) berpedoman pada point tentang prinsip - prinsip *green business* terkait penggunaan sumber daya dan energi pada operasional untuk mengetahui operasional perusahaan secara holistik dari proses penyediaan bahan baku, pengolahan produk dan limbah hingga pemasaran. Adapun point tentang prinsip - prinsip *green business* bisnis meliputi:

- a. Penggunaan sumber daya secara efektif
- b. Penggunaan sumber daya yang ramah lingkungan
- c. Penurunan volume limbah dan dampaknya terhadap lingkungan sekitar.
- d. Penggunaan bahan dasar ramah lingkungan
- e. Pengolahan limbah operasional secara efektif.

Di Lain sisi, Data yang diperoleh melalui wawancara dengan instansi pemerintah terkait, seperti Dinas Koperasi dan UMKM, DPRD, BAPPEDA, dan Sekretaris Daerah Kota Semarang akan diinterpretasikan dengan tujuan memahami peran pemerintah dalam mendukung dan mendorong UKM untuk menerapkan praktik bisnis hijau. Proses interpretasi dimulai dengan mengelompokkan kebijakan, program, serta bentuk bantuan yang telah diidentifikasi dari wawancara ke dalam kategori utama, seperti kebijakan regulatif, program insentif, atau bantuan teknis. Setiap kategori dianalisis untuk menilai dampak potensialnya terhadap UMKM yang menjalankan praktik ramah lingkungan.

1.8.8. **Kualitas Data**

Untuk mendukung akurasi dari penelitian ini, setiap data yang dihimpun dan dipergunakan memiliki kualitas yang baik dan dapat diandalkan untuk mendukung analisis dan temuan yang disajikan. Keabsahan data dalam penelitian sangat penting dan dipengaruhi oleh beberapa faktor kunci, seperti keaslian, kepercayaan, transferability, keterandalan, konfirmasi, dan ketepatan. Proses pengumpulan data yang cermat dan analisis yang teliti memberikan dasar yang kuat untuk menghasilkan konklusi yang akurat dan relevan. Metodologi triangulasi digunakan untuk meningkatkan validitas dan reliabilitas hasil penelitian dengan menggunakan berbagai perspektif, metode, sumber data, dan investigator. Menurut Institute of Global dalam (Susanto dkk, 2023) menjelaskan bahwa Triangulasi menelusuri validasi data yang telah tersedia guna memperkuat interpretasi dan memperbaiki kebijakan serta program yang berlandaskan bukti yang ada.